

## **ANALISIS STRATEGI EKONOMI, POLITIK, ILMU PENGETAHUAN, DAN SOSIAL BUDAYA DALAM KEJAYAAN DINASTI ABBASIYAH**

**Rizka Aulia<sup>1</sup>, Muhammad Ismail<sup>2</sup>, Agus Nilmada Azmi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

### **ABSTRAK**

Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah peradaban Islam dengan kemajuan pesat diberbagai bidang. Keberhasilan Dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan (*Golden Age of Islam*) tidak terlepas dari penerapan strategi yang terintegrasi dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi-strategi tersebut serta melihat bagaimana sinergi antarbidang mampu mendorong kemajuan peradaban Abbasiyah secara berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, dan sumber sejarah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan stabilitas politik yang inklusif, kebijakan ekonomi yang terbuka dan berorientasi perdagangan internasional, dukungan kuat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, strategi sosial budaya yang plural dan toleran. Keempat strategi tersebut saling melengkapi dan membentuk suatu sistem peradaban yang kokoh, sehingga menjadikan Dinasti Abbasiyah sebagai pusat peradaban dunia Islam dan rujukan global pada masanya. Temuan ini memberikan pelajaran penting bagi kepemimpinan modern mengenai pentingnya sinergi kebijakan dalam membangun peradaban yang maju dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Dinasti Abbasiyah, Masa Keemasan Islam, Strategi Politik, Strategi Ekonomi, Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya.

### **ABSTRACT**

*The Abbasid dynasty was one of the most important periods in the history of Islamic civilization with rapid progress in various fields. The success of the Abbasid Dynasty in reaching the Golden Age of Islam was inseparable from the implementation of an integrated strategy in the political, economic, scientific, and socio-cultural fields. This research aims to analyze these strategies and see how synergy between fields can encourage the progress of Abbasid civilization in a sustainable manner. The research method used is qualitative research with a library research approach, through the review of books, scientific journals, and relevant historical sources. The results of the study show inclusive political stability, open and international trade-oriented economic policies, strong support for the development of science, plural and tolerant socio-cultural strategies. These four strategies complemented each other and formed a solid civilization system, thus making the Abbasid Dynasty the center of civilization in the Islamic world and a global reference in its time. These findings provide important lessons for modern leadership about the importance of policy synergy in building an advanced and sustainable civilization.*

**Keywords :** *The Abbasid Dynasty, The Golden Age of Islam, Political Strategy, Economic Strategy, Science, Social Culture.*

---

Copyright (c) 2026 Rizka Aulia<sup>1</sup>, Muhammad Ismail<sup>2</sup>, Agus Nilmada Azmi<sup>3</sup>.

✉ Corresponding author : Rizka Aulia

Email Address : [rizkaaulia2nd@gmail.com](mailto:rizkaaulia2nd@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sistem peradaban Islam telah mengalami beberapa kali perubahan sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan dengan periode Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, hingga akhirnya muncul Dinasti Abbasiyah. Setiap fase perkembangan tersebut menunjukkan karakter politik, sosial, dan kelembagaan yang berbeda sesuai dengan tantangan internal dan eksternal pada zamannya. Perubahan bentuk kepemimpinan dan struktur kekuasaan ini mencerminkan dinamika peradaban Islam yang tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi dengan kondisi sosial dan politik yang dihadapi. Peralihan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah, oleh karena itu, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pergantian penguasa, melainkan sebagai transformasi mendasar dalam struktur sosial, orientasi politik, dan basis legitimasi kekuasaan Islam (Lapidus, 2014).

Dinasti Abbasiyah muncul dan menggantikan Dinasti Umayyah melalui gerakan politik yang terorganisasi dengan baik, yang dilakukan secara rahasia dan sistematis, terutama di wilayah-wilayah yang relatif minim pengaruh langsung kekuasaan Umayyah. Gerakan ini dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani yang berhasil mengkonsolidasikan dukungan masyarakat non-Arab, khususnya kaum *mawali*, yang selama ini mengalami diskriminasi struktural dalam sistem pemerintahan Umayyah. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang mencolok, seperti dominasi elite Arab dalam jabatan politik dan pembebanan pajak yang tidak adil kepada masyarakat non-Arab, dimanfaatkan secara efektif oleh para pendiri Dinasti Abbasiyah sebagai alat mobilisasi politik. Kondisi ini memperlemah legitimasi Dinasti Umayyah dan mempercepat runtuhnya kekuasaannya, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya tatanan politik baru di bawah Dinasti Abbasiyah (Kennedy, 2004).

Setelah berakhirnya kekuasaan Dinasti Umayyah, kekhalifahan diambil alih oleh Abu al-'Abbas as-Saffah sebagai khalifah pertama Dinasti Abbasiyah. Namun demikian, fase awal pemerintahan Abbasiyah masih diwarnai oleh instabilitas politik dan konflik internal, terutama terkait konsolidasi kekuasaan dan penyingkiran sisa-sisa kekuatan Umayyah. Stabilitas politik baru mulai terbangun secara lebih kokoh pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Manshur. Dalam upaya memperkuat legitimasi dan kontrol kekuasaan, al-Manshur menyingkirkan kelompok-kelompok yang berpotensi mengancam pemerintahannya serta memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Pembangunan Baghdad sebagai ibu kota baru tidak hanya memiliki makna politis, tetapi juga strategis dalam membentuk pusat administrasi, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih terorganisasi. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi konsolidasi kekuasaan dan stabilitas politik Dinasti Abbasiyah (Hitti, 2002).

Seiring dengan semakin stabilnya kondisi politik, Dinasti Abbasiyah mulai menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Periode ini secara bertahap mengantarkan Abbasiyah menuju masa kejayaannya, yang mencapai puncak pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun, masa keemasan (*Golden Age*) Dinasti Abbasiyah tidak tercipta secara instan, melainkan merupakan hasil dari kesinambungan kebijakan para khalifah sebelumnya yang saling melengkapi dan meneruskan program-program strategis. Stabilitas politik yang terjaga memungkinkan

pemerintah untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan ekonomi yang terencana, memperluas jaringan perdagangan internasional, serta memberikan dukungan besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kombinasi faktor-faktor inilah yang menjadikan Dinasti Abbasiyah sebagai pusat peradaban dunia Islam dan salah satu peradaban paling maju pada masanya (El-Ashker & Wilson, 2006).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi yang diterapkan oleh pemerintah Dinasti Abbasiyah dalam memajukan peradabannya, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sosial budaya. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa kejayaan Dinasti Abbasiyah merupakan hasil dari sinergi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman historis yang komprehensif mengenai dinamika dan keberhasilan Dinasti Abbasiyah, tetapi juga dapat dijadikan bahan refleksi dan pembelajaran bagi para pemimpin negara dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Lapidus, 2014).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam strategi ekonomi, politik, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diterapkan oleh Dinasti Abbasiyah dalam memajukan peradabannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data historis secara komprehensif dengan menekankan makna, konteks, serta keterkaitan antarperistiwa sejarah, bukan sekadar penyajian data secara kuantitatif (Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi karya-karya sejarah klasik dan kajian akademik yang secara langsung membahas Dinasti Abbasiyah, kebijakan para khalifah, serta perkembangan ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan pada masa tersebut. Sementara itu, sumber data sekunder berupa buku teks sejarah Islam, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi akademik lain yang relevan dan berfungsi untuk memperkuat serta melengkapi analisis terhadap sumber primer (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dianalisis mencakup buku sejarah, jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lain yang membahas Dinasti Abbasiyah dan masa keemasannya. Teknik ini dipilih karena objek penelitian bersifat historis dan tidak memungkinkan pengumpulan data melalui observasi langsung maupun wawancara (Zed, 2008).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu strategi ekonomi, politik, strategi dan strategi pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kritis untuk melihat keterkaitan

antarstrategi serta kontribusinya terhadap kemajuan peradaban Islam pada masa itu. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan logis (Miles Huberman, & Saldaña, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Strategi Ekonomi

Strategi ekonomi Dinasti Abbasiyah dibangun berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan Dinasti Umayyah yang menerapkan kebijakan ekonomi cenderung diskriminatif dan membebani kelompok tertentu, Dinasti Abbasiyah justru menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi kekuatan negara. Pemerintah Abbasiyah menyadari bahwa stabilitas politik dan kemajuan peradaban hanya dapat dicapai apabila sektor-sektor ekonomi produktif, khususnya pertanian dan perdagangan, dikelola secara adil dan berkelanjutan (Dieke Husna Kamilla, 2023).

Pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Manshur, strategi ekonomi difokuskan pada konsolidasi administrasi dan penataan keuangan negara. Pemindehan pusat pemerintahan ke Baghdad tidak hanya bermakna politis, tetapi juga strategis secara ekonomi karena menjadikan kota tersebut sebagai pusat perdagangan dan distribusi internasional. Pemerintah membangun sistem birokrasi ekonomi yang tertata melalui pengangkatan wazir dan pembentukan diwan-diwan yang mengatur pendapatan serta pengeluaran negara. Selain itu, negara berperan aktif dalam mengawasi harga pasar dan menjaga stabilitas ekonomi melalui mekanisme pengawasan perdagangan (Dieke Husna Kamilla).

Penguatan sektor riil menjadi strategi lanjutan pada masa pemerintahan Khalifah al-Mahdi. Pemerintah Abbasiyah memberikan keringanan pajak kepada petani, memperluas lahan pertanian, serta membangun infrastruktur irigasi berupa kanal dan bendungan guna meningkatkan produktivitas pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara, disertai dengan pengembangan sektor pertambangan dan industri sederhana. Diversifikasi sumber pendapatan ini menunjukkan bahwa strategi ekonomi Abbasiyah tidak bergantung pada satu sektor saja, melainkan bersifat menyeluruh dan berjangka panjang (Dieke Husna Kamilla, 2023).

Selain penguatan ekonomi domestik, Dinasti Abbasiyah juga menerapkan strategi ekonomi eksternal melalui pengembangan perdagangan internasional. Kekhalifahan Abbasiyah berhasil menguasai dan menghubungkan jalur perdagangan darat dan laut yang membentang dari Cina dan India, Asia Tengah, Afrika Timur, hingga kawasan Mediterania dan Eropa. Kota-kota seperti Baghdad dan Basrah berkembang sebagai pusat perdagangan internasional yang ramai. Pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi para pedagang serta menyediakan infrastruktur pendukung perdagangan, sehingga aktivitas ekonomi lintas negara dapat berlangsung secara stabil dan berkesinambungan (Arifah Zaitun Nawangsari, 2020).

Keberhasilan perdagangan internasional Dinasti Abbasiyah didukung oleh penggunaan mata uang dinar Abbasiyah yang berbasis emas dengan standar berat dan kemurnian yang relatif stabil. Dinar Abbasiyah diterima secara luas dalam transaksi internasional karena tingkat kepercayaan para

pedagang terhadap kestabilan nilainya. Penggunaan mata uang yang terstandarisasi ini memberikan kepastian dalam transaksi perdagangan lintas wilayah dan memperlancar arus barang serta modal. Dengan demikian, dinar Abbasiyah tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar domestik, tetapi juga menjadi salah satu standar mata uang internasional pada masanya (Arifah Zaitun Nawangsari, 2020).

Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, strategi ekonomi Dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya. Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terpusat melalui Baitul Mal dengan pembagian tugas yang jelas pada masing-masing diwan. Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber seperti kharaj, jizyah, zakat, usyr, fai, dan ghanimah. Pendapatan tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan administrasi dan pertahanan negara, tetapi juga dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan ilmiah, penerjemahan karya-karya asing, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi ekonomi Abbasiyah memiliki orientasi jangka panjang dalam membangun peradaban (Dieke Husna Kamilla, 2023).

Secara keseluruhan, strategi ekonomi Dinasti Abbasiyah bersifat holistik dan terintegrasi antara kebijakan fiskal, penguatan sektor produktif, serta keterbukaan terhadap perdagangan global. Stabilitas ekonomi yang ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan internasional, serta penggunaan mata uang yang stabil dan dipercaya menjadi fondasi utama kemajuan peradaban Islam pada masa keemasannya. Strategi ini membuktikan bahwa keberhasilan ekonomi Dinasti Abbasiyah tidak hanya bergantung pada kekuatan internal negara, tetapi juga pada kemampuannya beradaptasi dan berinteraksi dengan sistem ekonomi internasional (Dieke Husna Kamilla, 2023; Arifah Zaitun Nawangsari, 2020).

### **Analisis Strategi Politik**

Pada masa Dinasti Umayyah, ketimpangan sosial antara masyarakat Arab dan non-Arab terlihat sangat jelas dan terinstitusionalisasi dalam struktur kekuasaan. Dominasi bangsa Arab tidak hanya tercermin dalam penguasaan jabatan politik, tetapi juga dalam kepemilikan tanah dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi strategis. Masyarakat non-Arab, khususnya kaum *mawali*, sering kali diposisikan sebagai warga kelas dua yang dibebani pajak lebih tinggi serta memiliki akses terbatas terhadap jabatan publik, bahkan setelah mereka memeluk Islam. Praktik diskriminatif ini secara bertahap melemahkan legitimasi politik Dinasti Umayyah dan memicu kekecewaan sosial yang meluas, terutama di wilayah-wilayah pinggiran kekuasaan seperti Khurasan, yang kemudian menjadi basis perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah (Lapidus, 2014).

Kondisi tersebut dimanfaatkan secara efektif oleh para pendiri Dinasti Abbasiyah melalui strategi politik yang menekankan inklusivitas dan pluralisme. Berbeda dengan pendahulunya, Dinasti Abbasiyah membangun legitimasi kekuasaan dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat non-Arab dalam struktur pemerintahan. Jabatan-jabatan strategis tidak lagi dimonopoli oleh elite Arab, melainkan diberikan kepada individu berdasarkan kemampuan administratif, loyalitas politik, dan kompetensi, termasuk kepada kelompok Persia dan non-Arab lainnya. Pendekatan ini tidak

hanya memperluas basis dukungan politik Abbasiyah, tetapi juga menciptakan rasa keterlibatan dan keadilan di kalangan masyarakat yang sebelumnya termarginalkan (Kennedy, 2004).

Strategi politik inklusif tersebut diwujudkan secara konkret melalui pembentukan sistem administrasi negara yang lebih terstruktur dan profesional. Dinasti Abbasiyah mengembangkan birokrasi pemerintahan dengan pengangkatan wazir sebagai koordinator administrasi pusat, gubernur untuk mengelola wilayah daerah, serta pembentukan pasukan tentara profesional yang berada di bawah kontrol negara. Pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dalam birokrasi ini meningkatkan efisiensi pemerintahan serta memperkuat kontrol pusat terhadap wilayah-wilayah kekuasaan yang luas dan beragam. Dengan sistem administrasi yang lebih rapi dan rasional, pemerintahan Abbasiyah mampu meminimalkan fragmentasi kekuasaan yang kerap menjadi sumber instabilitas politik (Hitti, 2002).

Selain itu, keterbukaan politik Dinasti Abbasiyah juga tercermin dalam sikapnya terhadap masyarakat asing dan hubungan luar negeri. Melalui kerja sama perdagangan internasional dan asimilasi budaya, Abbasiyah tidak hanya memperkuat posisi ekonominya, tetapi juga membangun jaringan diplomatik yang luas. Interaksi lintas budaya ini berkontribusi pada citra Abbasiyah sebagai kekhalifahan yang kosmopolitan dan adaptif, sekaligus memperkuat legitimasi politiknya di mata dunia internasional. Dengan demikian, strategi politik Abbasiyah tidak bersifat tertutup, melainkan berorientasi pada pengelolaan keberagaman sebagai sumber kekuatan negara (Kennedy, 2004; Lapidus, 2014).

Dampak dari strategi politik yang inklusif dan sistem administrasi yang tertata tersebut terlihat pada meningkatnya stabilitas politik Dinasti Abbasiyah, terutama pada fase awal pemerintahannya. Jumlah pemberontakan relatif berkurang dibandingkan periode akhir Dinasti Umayyah, dan ketika muncul perlawanan, pemerintah pusat memiliki kapasitas institusional dan militer untuk menanganinya secara cepat dan terkoordinasi. Stabilitas politik ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan kebijakan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembentukan tatanan sosial budaya yang lebih harmonis. Dengan demikian, strategi politik Dinasti Abbasiyah tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban internal, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendorong kemajuan dan keberlanjutan peradaban Islam secara keseluruhan (Lapidus, 2014).

### **Analisis Strategi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah tidak berlangsung secara spontan, melainkan merupakan hasil dari strategi yang dirancang dan dijalankan secara sadar oleh negara. Pemerintah Abbasiyah memandang ilmu pengetahuan sebagai pilar utama dalam membangun peradaban Islam yang maju, stabil, dan berpengaruh secara global. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan negara yang terintegrasi dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Kondisi politik yang relatif stabil pada fase awal pemerintahan Abbasiyah memberikan ruang bagi negara untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal demi mendukung kegiatan intelektual dan ilmiah (Husaeni et al., 2024).

Salah satu strategi utama pengembangan ilmu pengetahuan adalah keterlibatan langsung para khalifah sebagai pelindung dan pendukung kaum intelektual. Khalifah Abbasiyah, khususnya al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan al-Ma'mun, memiliki pandangan luas mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi keberlangsungan kekuasaan dan kemajuan negara. Mereka tidak hanya memberikan legitimasi politik terhadap aktivitas ilmiah, tetapi juga menyediakan dukungan finansial melalui anggaran negara. Kekayaan negara dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit, lembaga pendidikan, perpustakaan, serta memberikan insentif kepada para ilmuwan, penerjemah, dan penulis. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara berperan aktif dalam menciptakan ekosistem keilmuan yang kondusif dan berkelanjutan (Abuddin Nata, 2022; Salsabila, 2021).

Strategi pengembangan ilmu pengetahuan Dinasti Abbasiyah juga tercermin dalam gerakan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya asing. Pemerintah Abbasiyah secara sistematis mendorong penerjemahan teks-teks Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, terutama dalam bidang filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu alam. Gerakan ini dipelopori sejak masa Khalifah al-Mansur dan mencapai puncaknya pada fase awal Abbasiyah. Para ilmuwan bahkan dikirim ke wilayah Byzantium untuk mencari manuskrip penting. Penerjemahan ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran ilmiah baru dalam dunia Islam (Aizid, 2015; Wahyudin, 2022).

Keberhasilan strategi penerjemahan tersebut diperkuat dengan pendirian lembaga-lembaga keilmuan yang terorganisasi. Salah satu institusi paling berpengaruh adalah Baitul Hikmah yang didirikan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Lembaga ini berfungsi sebagai perpustakaan besar, pusat penerjemahan, serta tempat penelitian dan diskusi ilmiah. Dengan koleksi ratusan ribu buku, Baitul Hikmah menjadi simbol kebesaran intelektual Dinasti Abbasiyah dan pusat lahirnya banyak ilmuwan terkemuka. Selain Baitul Hikmah, pemerintah juga mendukung berkembangnya madrasah, perpustakaan, observatorium, toko buku (*al-hawanit al-warraqin*), serta rumah-rumah ulama sebagai pusat pembelajaran informal (Abuddin Nata, 2022; Husaeni et al., 2024).

Strategi pengembangan ilmu pengetahuan Abbasiyah juga ditandai oleh penciptaan atmosfer akademik yang dinamis. Tradisi ilmiah seperti *muzakarah* (diskusi ilmiah), *rihlah ilmiah* (perjalanan menuntut ilmu), penelitian, penulisan buku, dan pemberian wakaf untuk pendidikan berkembang pesat. Negara memberikan kebebasan intelektual yang relatif luas, sehingga para ilmuwan dapat mengembangkan gagasan dan melakukan eksperimen tanpa tekanan ideologis yang berlebihan. Atmosfer ini mendorong munculnya inovasi dan pemikiran kritis yang menjadi ciri utama perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah (Husaeni et al., 2024).

Ciri penting lain dari strategi pengembangan ilmu pengetahuan Dinasti Abbasiyah adalah integrasi antara ilmu naqli dan ilmu aqli. Pemerintah tidak membatasi ilmu pengetahuan pada kajian keagamaan semata, tetapi juga mendorong pengembangan ilmu rasional yang bersumber dari akal manusia. Ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, astronomi, geografi, filsafat, dan bahasa berkembang pesat berdampingan dengan ilmu tafsir, hadits, dan ilmu

kalam. Integrasi ini melahirkan ilmuwan besar seperti al-Khawarizmi dalam bidang matematika, al-Razi dan Ibn Sina dalam bidang kedokteran, serta al-Biruni dalam bidang astronomi dan geografi. Karya-karya mereka tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga menjadi rujukan utama di Eropa selama berabad-abad (Nasution, 2013; Aizid, 2015).

Secara ekonomi, strategi pengembangan ilmu pengetahuan Dinasti Abbasiyah juga memberikan dampak yang signifikan. Kemajuan ilmu kedokteran meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, perkembangan matematika dan astronomi mendukung administrasi negara dan navigasi perdagangan, sementara ilmu geografi memperluas pengetahuan tentang jalur perdagangan internasional. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan penguatan posisi Abbasiyah sebagai pusat perdagangan dan peradaban dunia (Husaeni et al., 2024).

Secara keseluruhan, strategi pengembangan ilmu pengetahuan Dinasti Abbasiyah menunjukkan bahwa negara memainkan peran sentral dalam membangun peradaban berbasis ilmu. Dukungan politik, pembiayaan negara, pembangunan lembaga keilmuan, keterbukaan terhadap ilmu asing, serta integrasi antara ilmu agama dan ilmu rasional menjadi faktor utama tercapainya masa keemasan Islam. Strategi ini menjadikan Dinasti Abbasiyah bukan hanya sebagai kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat intelektual dunia yang pengaruhnya melampaui batas geografis dan zamannya (Husaeni et al., 2024).

### **Analisis Strategi Sosial Budaya**

Strategi sosial budaya Dinasti Abbasiyah memainkan peran penting dalam menopang stabilitas politik serta kemajuan peradaban Islam pada masa keemasannya. Berbeda dengan Dinasti Umayyah yang cenderung bercorak Arab-sentris, Dinasti Abbasiyah mengembangkan tatanan sosial yang lebih inklusif dan plural. Pemerintah Abbasiyah membuka ruang yang luas bagi berbagai kelompok etnis dan budaya, seperti Persia, Turki, Afrika, dan non-Arab lainnya, untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Pendekatan ini menciptakan struktur sosial yang lebih egaliter dan memperkuat integrasi masyarakat multikultural dalam satu kesatuan politik Islam (Lapidus, 2014; Husaeni et al., 2024).

Pluralisme sosial menjadi ciri utama masyarakat Abbasiyah. Kota-kota besar seperti Baghdad berkembang sebagai pusat pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi. Muslim, Kristen, Yahudi, serta kelompok agama lain hidup berdampingan dan berkontribusi dalam aktivitas ekonomi, perdagangan, dan intelektual. Pemerintah Abbasiyah memberikan jaminan keamanan dan kebebasan terbatas bagi non-Muslim melalui sistem *ahl al-dhimmah*, yang memungkinkan mereka mempertahankan identitas budaya dan keagamaannya. Kebijakan ini tidak hanya menciptakan harmoni sosial, tetapi juga mendorong pertukaran budaya dan pengetahuan lintas komunitas (Nasution, 2013).

Asimilasi budaya merupakan strategi sosial budaya yang secara sadar dikembangkan oleh Dinasti Abbasiyah. Pengaruh budaya Persia sangat kuat dalam sistem administrasi, etiket istana, kesusastraan, dan seni. Unsur-unsur

budaya Yunani dan India juga masuk melalui proses penerjemahan dan interaksi intelektual. Namun, asimilasi ini tidak menghilangkan identitas Islam, melainkan membentuk kebudayaan Islam yang kosmopolitan dan adaptif. Perpaduan berbagai unsur budaya tersebut memperkaya khazanah peradaban Abbasiyah dan menjadikannya unggul dibandingkan peradaban lain pada masanya (Aizid, 2015).

Dalam kehidupan sosial, Dinasti Abbasiyah juga memberikan perhatian besar pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan rumah sakit (*bimaristan*), lembaga pendidikan, tempat ibadah, serta fasilitas umum menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab sosial terhadap rakyatnya. Khalifah Harun ar-Rasyid, misalnya, menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan sosial dan pelayanan publik, termasuk bantuan kepada fakir miskin dan pengembangan layanan kesehatan. Kebijakan sosial ini memperkuat legitimasi moral pemerintah dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap kekhalifahan (Salsabila, 2021; Abuddin Nata, 2022).

Tradisi intelektual yang berkembang pesat pada masa Abbasiyah juga berdampak besar pada kehidupan sosial budaya. Aktivitas diskusi ilmiah, penulisan buku, dan pendidikan tidak hanya terbatas pada kalangan elit, tetapi juga meresap ke dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Toko-toko buku, majelis ilmu, dan rumah-rumah ulama menjadi ruang sosial baru tempat terjadinya interaksi intelektual dan budaya. Hal ini menciptakan masyarakat yang relatif literat dan menghargai ilmu pengetahuan sebagai bagian dari budaya sehari-hari (Husaeni et al., 2024).

Strategi sosial budaya Dinasti Abbasiyah juga tampak dalam toleransi terhadap perbedaan pandangan keagamaan dan pemikiran. Meskipun konflik teologis tetap ada, negara pada umumnya memberikan ruang bagi berkembangnya berbagai aliran pemikiran seperti Sunni, Syiah, Mu'tazilah, dan aliran-aliran teologi lainnya. Perdebatan intelektual dalam ilmu kalam, filsafat, dan tafsir menjadi bagian dari dinamika sosial budaya yang hidup. Kebebasan relatif ini mendorong lahirnya tradisi berpikir kritis dan memperkaya diskursus keislaman pada masa Abbasiyah (Syauqi, 2016).

Secara keseluruhan, strategi sosial budaya Dinasti Abbasiyah bersifat inklusif, adaptif, dan berorientasi pada integrasi masyarakat yang majemuk. Pluralisme sosial, asimilasi budaya, kebijakan kesejahteraan, serta toleransi intelektual menjadi faktor utama yang menciptakan kohesi sosial dan mendukung stabilitas pemerintahan. Strategi ini tidak hanya memperkuat struktur sosial Abbasiyah, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi berkembangnya ekonomi dan ilmu pengetahuan yang mengantarkan Dinasti Abbasiyah pada puncak kejayaannya sebagai pusat peradaban dunia Islam (Husaeni et al., 2024; Nasution, 2013).

### **Sinergi Strategi Ekonomi, Politik, Ilmu Pengetahuan, dan Sosial Budaya**

Keberhasilan Dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan tidak dapat dipahami melalui satu strategi tunggal, melainkan sebagai hasil dari sinergi yang kuat antara strategi ekonomi, politik, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sosial budaya. Keempat strategi tersebut saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain, membentuk fondasi peradaban Islam yang stabil, maju, dan berpengaruh secara global. Sinergi ini menunjukkan bahwa kejayaan

Abbasiyah merupakan hasil dari tata kelola negara yang holistik dan terintegrasi (Lapidus, 2014; Husaeni et al., 2024).

Strategi politik Abbasiyah yang bersifat inklusif dan plural menjadi titik awal terbentuknya sinergi antarbidang. Dengan membuka ruang kekuasaan bagi masyarakat non-Arab dan menata sistem birokrasi yang profesional, pemerintah berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif kuat. Stabilitas ini menjadi prasyarat utama bagi berjalannya kebijakan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa konflik internal yang berkepanjangan, negara memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya, mengembangkan perdagangan, serta mendukung aktivitas intelektual secara berkelanjutan (Kennedy, 2004; Hitti, 2002).

Stabilitas politik tersebut kemudian menopang strategi ekonomi Dinasti Abbasiyah. Kebijakan ekonomi yang adil, penguatan sektor pertanian, keterbukaan terhadap perdagangan internasional, serta penggunaan mata uang dinar yang stabil menciptakan kemakmuran negara. Kemakmuran ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menyediakan sumber pembiayaan bagi negara untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, strategi ekonomi berfungsi sebagai motor material yang menghidupkan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan sosial budaya (Dieke Husna Kamilla, 2023; Arifah Zaitun Nawangsari).

Di sisi lain, strategi pengembangan ilmu pengetahuan memperkuat efektivitas kebijakan politik dan ekonomi. Kemajuan dalam bidang matematika, administrasi, dan astronomi mendukung pengelolaan negara dan perdagangan, sementara perkembangan ilmu kedokteran dan pendidikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Negara yang berbasis ilmu pengetahuan mampu mengelola wilayah yang luas, merancang kebijakan ekonomi yang rasional, serta membangun legitimasi intelektual di mata dunia. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi simbol kejayaan Abbasiyah, tetapi juga instrumen strategis dalam menopang kekuasaan dan kemakmuran negara (Nasution, 2013; Husaeni et al., 2024).

Strategi sosial budaya berperan sebagai perekat yang menyatukan keberagaman masyarakat Abbasiyah. Pendekatan pluralistik, toleransi terhadap perbedaan etnis dan agama, serta asimilasi budaya menciptakan kohesi sosial yang kuat. Kohesi ini mengurangi potensi konflik horizontal dan memperkuat legitimasi kekuasaan Abbasiyah di mata rakyatnya. Selain itu, budaya literasi dan tradisi intelektual yang berkembang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kehidupan sosial, bukan sekadar milik elit istana atau ulama. Dengan demikian, strategi sosial budaya memastikan bahwa hasil dari kebijakan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dapat dirasakan dan didukung oleh masyarakat luas (Aizid, 2015; Salsabila, 2021).

Sinergi keempat strategi tersebut membentuk suatu siklus yang saling menguatkan. Stabilitas politik memungkinkan pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan ekonomi mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan sosial; kemajuan ilmu pengetahuan meningkatkan kapasitas negara dan kualitas hidup masyarakat; sementara kohesi sosial budaya menjaga stabilitas dan legitimasi politik. Siklus ini menjelaskan mengapa Dinasti Abbasiyah mampu mempertahankan kejayaannya dalam jangka waktu yang

relatif panjang dan menjadikannya pusat peradaban dunia Islam (Lapidus, 2014; Husaeni et al., 2024).

Secara keseluruhan, sinergi antara strategi politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya menunjukkan bahwa keberhasilan Dinasti Abbasiyah bukanlah hasil kebetulan sejarah, melainkan buah dari perencanaan dan pengelolaan negara yang komprehensif. Model sinergi ini memberikan pelajaran penting bagi kepemimpinan modern bahwa kemajuan peradaban hanya dapat dicapai apabila kebijakan negara dirancang secara terintegrasi, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan pengelolaan keberagaman sosial budaya secara bijaksana (Lapidus, 2014).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kejayaan Dinasti Abbasiyah bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan buah dari sinergi antara strategi ekonomi, politik, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sosial budaya. Strategi politik Abbasiyah yang bersifat inklusif dan tidak diskriminatif berhasil menciptakan stabilitas pemerintahan serta mengurangi konflik internal, sehingga memberikan ruang bagi pembangunan di sektor lainnya.

Dalam bidang ekonomi, Dinasti Abbasiyah menerapkan kebijakan yang terbuka dan progresif melalui penguatan sektor pertanian, pengembangan perdagangan antarnegara, serta penggunaan mata uang dinar yang stabil dan dipercaya secara internasional. Kondisi ekonomi yang kuat ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menyediakan sumber daya yang memadai bagi negara untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pelayanan sosial.

Pengembangan ilmu pengetahuan menjadi salah satu ciri utama masa keemasan Dinasti Abbasiyah. Dukungan penuh dari para khalifah terhadap penerjemahan karya asing, pendirian lembaga pendidikan, serta penciptaan iklim intelektual yang kondusif melahirkan banyak ilmuwan dan kemajuan signifikan dalam berbagai cabang ilmu, baik ilmu naqli maupun ilmu aqli. Kemajuan intelektual ini berperan penting dalam meningkatkan kapasitas administrasi negara, perdagangan, dan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, strategi sosial budaya Abbasiyah yang plural, toleran, dan adaptif mampu menyatukan masyarakat yang majemuk dalam satu tatanan sosial yang relatif harmonis. Asimilasi budaya dan penghargaan terhadap perbedaan etnis, agama, serta pemikiran menciptakan kohesi sosial yang kuat dan memperkuat legitimasi kekuasaan Abbasiyah.

Dengan demikian, sinergi keempat strategi tersebut membentuk suatu sistem peradaban yang saling menguatkan dan berkelanjutan. Model peradaban Dinasti Abbasiyah menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara atau peradaban hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang terintegrasi, berorientasi pada keadilan sosial, penguatan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengelolaan keberagaman secara bijaksana. Nilai-nilai ini tetap relevan dan dapat dijadikan pembelajaran bagi para pemimpin negara dalam upaya memajukan peradaban di era modern.

## REFERENSI

- El-Ashker, Ahmed A. F., dan Rodney Wilson. *Islamic Economics: A Short History*. Leiden: Brill, 2006.
- Aizid. *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*. 10th ed. New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Husaeni, Benies, Euis Ismayati Yuniar, Wicka Yunita Dwi Utami, Elenita Drihestyawati, dan Lulu Siti Nuraini. "Kemajuan Ilmu Pengetahuan di Era Dinasti Abbasiyah." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1 (2024): 262–269.
- Kamilla, Dieke Husna. "Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini." *Jurnal Nirwasita* 4, no. 2 (2023): 116–124.
- Kennedy, Hugh. *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*. 2nd ed. London: Pearson Education, 2004.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nasution, Harun. *Sejarah Peradaban Islam*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2013.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Nawangarsari, Arifah Zaitun. "Perkembangan Perdagangan Internasional pada Masa Dinasti Abbasiyah." Artikel PDF, 2020.
- Salsabila, R. "Sejarah Dinasti Abbasiyah dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Modern." *ALSYS* 1, no. 1 (2021): 97–112. <https://doi.org/10.58578/alsys.v1i1.22>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syauqi, Abrari. *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016.
- Wahyudin, A. "Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah bagi Peserta Didik Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Bojonegara." *DESANTA: Indonesian Journal of Interdisciplinary Studies* 3, no. 1 (2022): 268–273.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.